

PRIORITAS 10	DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK
TEMA PRIORITAS	<i>Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik</i>
PENANGGUNGJAWAB	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
BEKERJSAMA DENGAN	Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kesehatan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertahanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Luar Negeri; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertahanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
Substansi Inti 1, KEBIJAKAN : Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011										
1	Pelaksanaan Koordinasi dan Evaluasi Hubungan Multilateral, Wilayah Negara, dan Tata Ruang Pertahanan, serta Koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal	Terlaksananya koordinasi dan evaluasi hubungan multilateral, wilayah negara dan tata ruang pertahanan, serta koordinasi penge-lolaan masyarakat kawasan	Jumlah rapat koordinasi	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	26,824	Kemenko Polhukam
			Jumlah pemantauan dan evaluasi	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali		

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		tertinggal								
2	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Meningkatnya koordinasi antar sektor dalam pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan	Jumlah rapat koordinasi Jumlah rencana aksi pengembangan daerah tertinggal di kawasan perbatasan yg dilaksanakan	4 27	4 27	4 27	4 27	4 27	147	KPDT
3	Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan	Meningkatnya sar pras dalam pelayanan umum pemerintahan	Prosentase jumlah kab/kota di wilayah perbatasan yang mendapat sarpras perbatasan antar negara	25	50	75	85	100	977,18	Kemendagri
		Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG)	Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara	6	6	6	6	6		
		Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar negara	Prosentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara	25	50	75	85	100		
		Meningkatnya kemampuan pengelolaan Pos Lintas Batas (PLB) internasional dan tradisional secara terpadu yang telah disepakati antar negara	Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai	3	3	3	3	3		
		17 provinsi/ 100 rute	Jumlah rute yang terseenggara	tersebar			tersebar	tersebar		

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
4	Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika	Layanan komunikasi dan informatika di wilayah non komersial	▪ Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi	100%	100%	100%	100%	100%	4.036,42	Kemenkominfo
			▪ Prosentase desa yang dilayani akses internet	5%	20%	40%	60%	80%		
			▪ Prosentase ibukota provinsi yang memiliki regional <i>internet exchange</i>	10%	30%	50%	80%	100%		
			▪ Prosentase ibukota provinsi yang memiliki <i>international internet exchange</i>	10%	30%	50%	80%	100%		
			▪ Jumlah Desa Informasi yang dilengkapi radio komunitas	15 desa	76 desa	200 desa	350 desa	500 desa		
5	Pembinaan pelayanan kesehatan komunitas*	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Jumlah puskesmas yg menjadi puskes-mas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk	76	81	86	91	96		Kemenkes

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
6	Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)*	Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat miskin di puskesmas	Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas prioritas dipernastasi dan pulau terluar	101	101	101	101	101		Kemenkes
7	Pembinaan Pelayanan Medik Spesialistik*	Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepa-da masyarakat	Jumlah RS bergerak yang memberikan pelayanan kesehatan rujukan di DTPK	14	14	10	10	10		Kemenkes
8	Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan*	Meningkatnya perencanaan dan pendayagunaan SDM Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah tenaga kesehatan yang didaya gunakan di DTPK • Jumlah residen senior dan tenaga kesehatan yang diberikan insentif melalui pendayagunaan di DTPK • Jumlah residen senior yang didaya gunakan di DTPK 	1200	1260	1320	1380	1470		Kemenkes
9	Penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan	Tersedianya guru yang bermutu dan merata antar prov, kab, dan kota.	Jumlah guru penerima tunjangan khusus	30.000 orang	30.000 orang	30.000 orang	30.000 orang	30.000 orang	300	Kemendiknas
10	Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan	Meningkatnya pemberdayaan dan pengembangan pendidikan tenaga kependidikan	Persentase guru di daerah terpencil yang mengikuti peningkatan-yan kompetensi dan profesionalisme	10%	20%	30%	40%	50%	*) Pagu termasuk dalam Prioritas 2	Kemendiknas
11	Pendayagunaan pulau-pulau kecil	Terwujudnya 200 pulau kecil yang memiliki infrastruktur mamadai,	Jumlah pulau kecil yang diidentifikasi dan dipetakan pertamanya termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	55 pulau	60 pulau	50 pulau	20 pulau	578.49	KKP

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
		ekosistem baik, siap terhadap bencana, dan 25 di antaranya terinvestasi	Jumlah pulau kecil yang memiliki infrastruktur memadai secara terintegrasi, termasuk pulau-pulau kecil terluar	20 pulau	55 pulau	60 pulau	50 pulau	20 pulau		
12	Dukungan pengembangan dan penda-yagunaan teknologi pendukung pemba-ngunan daerah tertinggal, terdepan dan pasca konflik	Kebijakan, penda-yagunaan teknolo-gi pendukung pem bangunan	Jumlah kebijakan	1	1	1	1	1	5,00	KRT
			Jumlah pilot pendukung teknologi untuk pembangunan daerah tertinggal	1	1	1	1	1		
13	Teknologi Efisiensi Pemanfaatan Sumberdaya Air	Termanfaatkannya teknologi efisiensi pemanfaatan sumberdaya air di daerah tertinggal	Rekomendasi dan pilot plant untuk pemanfaatan sumberdaya air	1	1	1	1	1	6,25	BPPT
Substansi Inti 2, KERJASAMA INTERNASIONAL :										
Pembentukan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam rangka pengamanan wilayah dan sumber daya kelautan										
1	Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas	Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas <i>IUU fishing</i>	Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian barat	3 WPP	3 WPP	4 WPP	5 WPP	5 WPP	1617.32	KKP
			Jumlah wilayah pengelolaan perikanan bagian timur	6 WPP	6 WPP	6 WPP	6 WPP	6 WPP		
2	Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Pemantuan Kapal Perikanan	Terpenuhinya sarana dan prasarana pengawasan dengan rancang bangun dan sistem pemantauan yang terintegrasi dan tepat sasaran	Jumlah pemenuhan sarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu :						536.85	KKP
			• Kapal Pengawas	0	4	18	18	15		
			• Speedboat	15	32	28	32	30		
			• Stasiun Rabar Satelit	0	0	0	0	0		
			• Transmitter	0	1000	0	0	0		

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan prsarana pengawasan yang memadai secara terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu • Kantor dan bangunan pengawas • Dermaga • Pos pengawas 							
				5	6	6	7	6		
				2	6	6	7	6		
				15	10	15	15	15		
3	Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	Meningkatnya sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	Jumlah sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan	10%	6%	7%	9%	10%	12.86	Kemenhan
4	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan	Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan	Prosentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan nasional	45%	44%	45%	46%	47%	54.68	Kemenhan
Substansi Inti 3, KEUTUHAN WILAYAH:										
Penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina pada 2010-2014										
1	Pelaksanaan Perundingan Perbatasan RI-Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau.	Terselenggaranya perundingan perbatasan RI-Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam, dan Palau	Jumlah pelaksanaan perundingan perbatasan maritim dan darat	12 perundingan	12 perundingan	12 perundingan	12 perundingan	12 perundingan	12,82	Kemenlu
2	Pemetaan Batas wilayah	Tersusunnya kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah	Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) kori-dor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000	-	12	12	15	5	4.4	BAKOSURTANAL
			Jumlah NLP pemetaan kecamatan kawasan perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia, dan RI-RDTL skala 1:50.000 serta skala 1:25.000	72	89	-	-	-	13.1	

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
			Jumlah pemetaan pulau-pulau terluar	25	20	13	-	-	2.4	
			Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL	-	60	60	60	60	2.6	
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-Malaysia	22	22	22	22	22	12.1	
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-PNG	-	5	5	5	5	4.9	
			Jumlah Perapatan pilar batas RI-RDTL	60	60	60	60	60	6.1	
			Jumlah dokumen perundingan teknis batas darat	3	3	3	3	3	6.4	
			Jumlah dokumen perundingan teknis batas maritim	3	3	3	4	4	6	
3	Pengelolaan Pertanahan Provinsi	Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	200 SP	187 SP	184 SP	157 SP	157 SP	98,76	BPN
4	Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat)	Data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT)	1 Paket	1 Paket	1Paket	1 Paket	1 Paket	29,62	BPN
Substansi Inti 4, DAERAH TERTINGGAL: Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014										
1	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT	Tersedianya permukiman dan infrastruktur Pemberian jaminan hidup	2.515 unit 2.515 KK	2.650 unit 2.650 KK	3.150 unit 3.150 KK	3.850 unit 3.850 KK	4.250 unit 4.250 KK	763.6	Kemensos

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
2	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pusat produksi daerah tertinggal	1. Meningkatnya pengembangan pusat produksi di daerah tertinggal 2. Terfasilitasinya pemulihan ekonomi dan pengurangan kemiskinan, dengan menciptakan dan memberdayakan lingkungan pendukung bagi perbaikan kegiatan usaha dan pembangunan manusia	1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki pusat produksi 2. (a). meningkatkan kemampuan dan keberdayaan petani skala kecil dan aparat pemerintah untuk mendukung kegiatan usaha berbasis kelompok di perdesaan, (b). Melaksanakan kegiatan perbaikan usaha pertanian dan usaha lainnya, (c). Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan belanja publik, manajemen pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program.	20%	40%	60%	80%	100%	309.60	KPDT
				100%	100%	100%				
3	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal	1. Meningkatnya pengembangan pusat pertumbuhan di Daerah Tertinggal 2. Terfasilitasinya pembiayaan untuk pengembangan ekonomi	1. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang memiliki Pusat Pertumbuhan 2. Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk pengembangan ekonomi melalui (a) Berkembangnya sektor usaha swasta berorientasi pasar, (b) meningkatnya kualitas dan nilai tambah produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, (c). Meningkatkan perdagangan internasional, dan (d). Meningkatkan investasi dalam negeri maupun luar negeri	20%	40%	60%	80%	100%	676.59	KPDT
				100%	100%	100%				

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
4	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi usaha mikro kecil menengah dan koperasi daerah tertinggal	Meningkatnya pengembangan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal	Persentase daerah tertinggal yang mengembangkan usaha mikro kecil menengah dan koperasi di daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	93.00	KPDT
5	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pendanaan dan kemitraan usaha daerah tertinggal	Meningkatnya ketersediaan sumber pendanaan dan pengembangan kemitraan usaha di daerah tertinggal	Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang telah memiliki sumber pendanaan dan melaksanakan kemitraan usaha dengan daerah lain.	20%	40%	60%	80%	100%	92.00	KPDT
6	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi investasi ekonomi daerah tertinggal	Meningkatnya jumlah dan nilai investasi di daerah tertinggal	Persentase kabupaten di daerah tertinggal yang telah meningkatkan jumlah dan nilai investasi	20%	40%	60%	80%	100%	96.00	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
7	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.	1. Meningkatnya kemampuan sistem, organisasi, dan SDM pemerintahan daerah untuk mewujudkan good governance 2. (i) Meningkatnya kemampuan kelembagaan Pemda dan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Meningkatnya kegiatan ekonomi, pengembangan sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan perdesaan secara terpadu di daerah tertinggal, dan (iii) Meningkatkan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, melalui PNPM Mandiri	1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan mengalami peningkatan indeks good governance 2. (i) Persentase jumlah kabupaten tertinggal yang kemampuan kelembagaan pembangunan masyarakat dan pemda meningkat dalam pengelolaan sumberdaya lokal, (ii) Persentase jumlah kawasan pembangunan perdesaan yang terpadu dari aspek ekonomi, sumberdaya manusia, dan infrastruktur lingkungan, dan (iii) Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang mengalami peningkatan mobilitas penduduk dan arus barang antara daerah tertinggal ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik	20%	40%	60%	80%	100%	1,227.49	KPDT
				64%	100%	100%	100%	100%		

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
8	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kelembagaan sosial masyarakat daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	89.00	KPDT
9	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga kerjasama antar daerah daerah tertinggal	Meningkatnya kerjasama antar lembaga pemerintah di daerah tertinggal	persentase kabupaten daerah tertinggal yang menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah lain.	20%	40%	60%	80%	100%	85.00	KPDT
10	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi lembaga perekonomian daerah tertinggal	Meningkatnya kapasitas lembaga perekonomian daerah tertinggal	persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan lembaga perekonomian di daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	77.00	KPDT
11	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kemitraan antar lembaga daerah tertinggal	Meningkatnya kemitraan antar lembaga pemerintahan kabupaten daerah tertinggal	persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi penguatan kemitraan antar lembaga daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	77.00	KPDT
12	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	Meningkatnya koordinasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memperoleh fasilitasi pembangunan infrastruktur kesehatan daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	70.00	KPDT
13	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	62.00	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
14	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur pendidikan daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	48.00	KPDT
15	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan di Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan Pendidikan Dasar, Menengah Dan Kejuruan Daerah Tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	48.00	KPDT
16	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	87.00	KPDT
17	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur ekonomi daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	170.00	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
18	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal	1. Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari untuk Pengembangan Infrastruktur Dasar di Wilayah Perdesaan Tertinggal Terpenting	1. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur energi daerah tertinggal 2. Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki database permintaan kelistrikan dengan menggunakan teknologi GIS dan memanfaatkan energi matahari untuk pengembangan infrastruktur serta peningkatan kemampuan masyarakat yang dapat melakukan pemetaan Wilayah Rentan Perubahan Iklim dan Kegiatan Adaptasi Untuk Mengantisipasi Perubahan Iklim	20%	40%	60%	80%	100%	220.49	KPDT
19	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan pembangunan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	60.00	KPDT
20	Pengembangan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal	Meningkatnya persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal	Persentase kabupaten didaerah tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang pembangunan infrastruktur transportasi daerah tertinggal	20%	40%	60%	80%	100%	232.00	KPDT

No	SUBSTANSI INTI/KEGIATAN/ PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					INDIKASI PAGU	K/L
				2010	2011	2012	2013	2014	Total	
21	Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut	Tersedianya kapal penumpang dan perintis 34 unit	Unit kapal	2	5	10	8	9	2.793,7	Kemenhub
		Tersedianya subsidi perintis angkutan laut 76 trayek di 17 provinsi	Trayek	60	64	68	72	76	2.135,0	
22	Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan	Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan (577 bus perintis dan 907 lintas perintis)	Lintas bus perintis	175	177	180	185	190	284,89	Kemenhub
			Unit bus perintis	37	100	120	150	170	200,25	
23	Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP	Terbangunnya 20 Sarana Keperintisan	Jumlah Sarana	4	3	4	5	4	1.264,8	Kemenhub
		Tersedianya 510 pelayanan Keperintisan	Jumlah Lintas	85	95	100	110	120	775,9	
24	Pelayanan Angkutan Udara Perintis	Tersedianya 580 rute perintis	Jumlah rute perintis yang terlayani	118	118	114	115	115	892,42	Kemenhub